

ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA ATAS RATIFIKASI PARIS AGREEMENT TERKAIT KEBIJAKAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nadira Tatyana¹ dan Wahyu Yun Santoso²

INTISARI

Penelitian ini membahas mengenai analisis manfaat biaya atas ratifikasi *Paris Agreement* terkait kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, pembahasan difokuskan pada instrumen hukum dan ekonomi lingkungan untuk pendanaan pengendalian perubahan iklim dalam pencapaian target *Nationally Determined Contribution* Indonesia, yaitu penurunan emisi GRK sebesar 29% dalam skenario *business as usual* dengan upaya nasional dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disajikan dalam penyajian deskriptif analitis atas fakta-fakta hukum terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pencapaian NDC dengan analisis normatif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif terhadap dokumen hukum dan laporan pemerintah pada periode tahun 2016-2019.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya pengendalian perubahan iklim dengan mengikuti ketentuan dalam *Paris Agreement* maupun merujuk pada hasil penelitian IPCC, yang mana memberikan kemanfaatan lebih banyak dibanding tidak melakukan aksi dalam pengendalian perubahan iklim sama sekali. Selain itu, dibutuhkan instrumen pendanaan yang salah satunya berupa instrumen ekonomi lingkungan hidup untuk mendanai upaya pengendalian perubahan iklim.

Kata kunci: Perubahan Iklim, Persetujuan Paris, Analisis Manfaat dan Biaya, *Nationally Determined Contribution*.

¹ Mahasiswa, Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen, Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**COST AND BENEFIT ANALYSIS ON PARIS AGREEMENT
RATIFICATION RELATED TO ADAPTATION AND MITIGATION
POLICIES OF MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

Nadira Tatyana³ and Wahyu Yun Santoso⁴

ABSTRACT

This research discusses about cost and benefit analysis of Paris Agreement ratification related to adaptation and mitigation policies of Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Further, it discusses the legal and economic instruments for financing the climate change efforts in order to achieve the Nationally Determined Contribution's goal, which is reducing GHG emission by 29% on business as usual scenario with national efforts and 41% with international help by 2030.

This research is normative legal research and presented with descriptive analytical approach which elaborates empirical data related to the adaptation and mitigation strategies in pursuing NDC using normative analytics. Research data is analyzed using qualitative method towards government's documents and reports on 2016-2019 period.

The findings show that Indonesia's government has put efforts to tackle climate change according to Paris Agreement's provisions and referring to IPCC's reports, which gives more beneficiaries than choosing to do no action at all for tackling climate change. In addition, in order to finance climate change strategies, financial instruments which includes environmental economic instrument is significantly needed.

Keywords: Climate Change, Paris Agreement, Cost Benefit Analysis, Nationally Determined Contribution.

³ Undergraduate Student, Environmental Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer, Environmental Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.